

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan diselenggarakannya otonomi daerah, daerah harus dapat mengembangkan daerahnya sendiri agar apa yang menjadi tujuan diselenggarakannya otonomi daerah dapat terlaksana. Untuk itu diperlukan banyak dana yang harus dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah yang salah satunya adalah belanja modal. Dengan demikian belanja modal merupakan faktor penting dalam menyelenggarakan pembangunan daerah.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Aset tetap merupakan persyaratan utama dalam memberikan pelayanan publik oleh daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD. Belanja modal ini dapat didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah.

Dampak yang timbul dari rendahnya realisasi belanja modal adalah infrastruktur yang ada tidak memadai dan tidak ada penambahan yang signifikan dari sisi jumlah proyek infrastruktur baru yang menyebabkan para investor swasta nasional maupun investor asing enggan berinvestasi di daerah sehingga perekonomian daerah tersebut tidak berkembang yang akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi dan akan selalu bergantung dari APBN dan APBD sebagai penggerak utama perekonomian.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi belanja modal. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi

belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin membaik. Pemerintah daerah yang berhasil menjalankan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak terlepas dari pengelolaan APBD secara efektif dan efisien (Wadira 2013).

Setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan kegiatan.

Ada beberapa judul penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Arif Purnama (2014) dengan judul Pengaruh Dana alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Periode 2012-2013. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum (DAU), dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal. Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) dan luas wilayah berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal.

Jati Dwi Aprianto (2016) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2014. Hasil penelitian menunjukkan PAD,

DAK, dan silpa berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di kabupaten/kota di provinsi jawa tengah, namun pertumbuhan ekonomi dan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di kabupaten/kota di provinsi jawa tengah. Untuk dana sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), pendapatan asli daerah dan belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Tahun 2011-2020

Tahun	Dana SiLPA	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Modal
2011	107.031.078.487,14	25.923.443.647,64	84.055.264.025
2012	123.621.186.133,14	31.239.720.870,94	105.762.113.998
2013	149.847.142.627,64	36.327.694.944,50	156.241.276.123
2014	244.231.072.591,74	61.898.590.785,10	133.129.061.769
2015	224.088.257.362,48	76.086.059.848,74	159.844.079.926
2016	108.911.545.969,57	71.848.806.283,09	205.776.062.468
2017	119.384.734.620,59	189.534.208.708,67	235.387.567.575
2018	74.840.984.363,05	71.487.909.124,46	282.478.866.695
2019	85.963.040.574,47	77.594.080.656,42	248.312.505.585
2020	73.937.834.980,13	64.192.990.192,85	218.800.559.811

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011-2020

Pengertian SiLPA menurut Junaedy (2016:166) adalah suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan. Semakin menurun dana sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) maka semakin meningkat belanja modal pada pemerintah daerah.

Namun kenyataannya dilihat dari Tabel 1.1 maka dana sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) naik turun, hal ini dapat diketahui pada tahun 2011 sampai 2014 jumlah dana sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) mengalami peningkatan, tahun 2015 dan 2016 dana sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) mengalami penurunan, tahun 2017 dana sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) mengalami peningkatan, tahun 2018 dana sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) mengalami penurunan, tahun 2019 dana sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) mengalami peningkatan kemudian pada tahun 2020 dana sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) mengalami penurunan, artinya dana sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dari tahun 2011-2020 tidak stabil, sehingga hal ini menjadi salah satu permasalahan dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan kelalaian pengelolaan aparatur pemerintah daerah dalam perencanaan program/kegiatan atau belanja serta keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan sehingga pengelolaan keuangan tidak efisien.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim (2014:96) adalah semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin meningkat pendapatan asli daerah maka semakin meningkat belanja modal.

Namun dilihat dari tabel 1.1 bahwa pendapatan asli daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan naik turun, hal ini dapat diketahui pada tahun 2011 sampai 2017 mengalami peningkatan, tahun 2018

mengalami penurunan, tahun 2019 mengalami peningkatan, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan. Fenomena yang terjadi bahwa untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan masih terdapat kendala diantaranya masih kurang kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah. Kendala dalam pengalokasian belanja modal yang sering terjadi adalah adanya perbedaan nominal harga yang dianggarkan untuk belanja modal tidak sesuai dengan nominal harga riil di lapangan contoh dalam pembelian tanah selain masalah itu juga sering terdapat perbedaan jenis spesifikasi pembelian aset misalnya dalam pembelian kendaraan operasional. Sedangkan permasalahan mendesak yang harus segera dibenahi oleh pemerintah daerah adalah pengembangan dan perbaikan jaringan infrastruktur dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Pemerinth Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011-2020”**

1.2 MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan?

1.3 PERSOALAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka persoalan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan?

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik

Secara akademik, penelitian ini diharapkan agar dapat memperkaya khasana keilmuan akuntansi terutama Akuntansi Sektor Publik serta penelitian lanjutan dalam penelitian yang sama.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, sebagai bahan masukan khususnya bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan lagi Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.